

SKRIPSI
STRATEGI KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PROGRAM FORUM ANAK MELALUI
GARDU TANGKAS PERAK (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Kandai
dua Kecamatan woja Kabupaten Dompu)

Untuk Memenuhi Persyaratan
Memperoleh Gelar Serjana (S1)



DI BUAT OLEH :
MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI
218110109

KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

TAHUN 2022

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

**STRATEGI KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PROGRAM FORUM ANAK
MELALUI GARDU TANGKAS PERAK (STUDI KASUS PADA
KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA KECAMATAN WOJA
KABUPATEN DOMPU)**

Oleh:

MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI

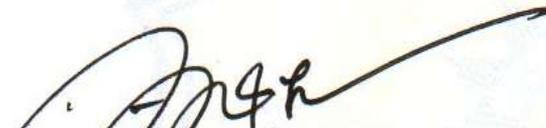
218110109

Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar serjana pada program
studi Administrasi publik Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik
Universitas Muhammadiyah Mataram

Menyetujui

Pembimbing

Pembimbing I,


Amin Saleh, S.Sos., M.I.Kom.
NIDN: 0831128310

Pembimbing II,


M. Taufik Rachman, S.H., M.H.
NIDN: 0825078701


Ketua Program Ilmu Administrasi Publik

Rahmad Hidayat, S.AP., M.AP.
NIDN: 0822048901

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**STRATEGI KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PROGRAM FORUM
ANAK MELALUI GARDU TANGKAS PERAK (STUDI
KASUS PADA KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA
KECAMATAN WOJA KABUPATEN DOMPU)**

Oleh:

MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI

Telah dipertahankan di depan penguji
pada tanggal 05 februari 2022
dinyatakan telah memenuhi persyaratan

Tim penguji :

Amin Saleh, S.Sos.,M.I.Kom.

(PU)

NIDN: 0831128310

M.Taufik Rachman, S.H.,M.H.

(PP)

NIDN: 0825078701

Mardiah, S.sos.,M.Si.

(PN)

NIDN : 0804117201

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Dr. R. Muhammad Ali Ihsan, M.Si.

NIDN. 0806066801

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Maratun Awalia Sa'bani Putri

Nim : 218110109

Dengan Menyatakan Bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (serjana, magister, dan/atau doktor baik di universitas muhammadiyah mataram maupun di perguruan tinggi lainnya).
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tsnpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidisk benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi.

Mataram. Februari 2022



Maratun awalia sa'bani putri
218110109



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN H. LALU MUDJITAHID UMMAT

Jl. K.H.A.-Dahlan No.1 Telp.(0370)633723 Fax. (0370) 641906 Kotak Pos No. 108 Mataram
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

SURAT PERNYATAAN BEBAS
PLAGIARISME

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI
NIM : 218110109
Tempat/Tgl Lahir : DOMPU, 20 NOVEMBER 2001
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. Hp : 081237074608
Email : maratunawalia@gmail.com

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi/KTI/Tesis* saya yang berjudul :

STRATEGI KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA DALAM MENINGKATKAN
PELAYANAN PROGRAM FORUM ANAK MELALUI GARDU TANGKAS PERAK
(STUDI KASUS PADA KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA KEC. WOJA
KAB. DOMPU)

Bebas dari Plagiarisme dan bukan hasil karya orang lain. *Abg*

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Skripsi/KTI/Tesis* tersebut terdapat indikasi plagiarisme atau bagian dari karya ilmiah milik orang lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dan disebutkan sumber secara lengkap dalam daftar pustaka, saya bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Mataram.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari siapapun dan untuk dipergunakan sebagai mana mestinya.

Mataram, 22 Februari 2022
Penulis



MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI
NIM. 218110109

Mengetahui,
Kepala UPT. Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos., M.A. *ff*
NIDN. 0802048904

*pilih salah satu yang sesuai



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 1 Mataram Nusa Tenggara Barat
Kotak Pos 108 Telp. 0370 - 633723 Fax. 0370-641906
Website : <http://www.lib.ummat.ac.id> E-mail : perpustakaan@ummat.ac.id

**SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN
PUBLIKASI KARYA ILMIAH**

Sebagai sivitas akademika Universitas Muhammadiyah Mataram, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI
NIM : 218110109
Tempat/Tgl Lahir : DOMPDU, 20 NOVEMBER 2001
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK
Fakultas : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
No. Hp/Email : 081237974608 / maratunawalia@gmail.com
Jenis Penelitian : Skripsi KTI Tesis

Menyatakan bahwa demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Mataram hak menyimpan, mengalih-media/format, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Repository atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama *tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta* atas karya ilmiah saya berjudul:

STRATEGI KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PROGRAM FORUM ANAK MELALUI
CARDU TANGKAS PERAK (STUDI KASUS PADA KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA
KEC. WOJA, KAB. DOMPDU).

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Mataram, 22... Februari...2022
Penulis



MARATUN AWALIA SA'BANI PUTRI
NIM. 218110109

Mengetahui,
Kepala UPT Perpustakaan UMMAT



Iskandar, S.Sos.,M.A.
NIDN. 0802048904

MOTTO

Jangan mundur sebelum mencoba, beban berat itu hanya ada pada pikiran, coba dulu nanti akan terbiasan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Strategi Kantor Kelurahan Kandai Dua Dalam Meningkatkan Pelayanan Program Forum Anak Melalui Gardu Tangkas Perak*” tepat pada waktunya, yang merupakan syarat untuk menyelesaikan program Strata 1 (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Muhammadiyah Mataram.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terwujud apabila tidak ada bantuan dari berbagai pihak maka dari itu melalui kesempatan ini izinkan saya menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Dr. H. Arsyad Abd. Gani, M.Pd selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Mataram.
2. Dr. H . Muhammad Ali , M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram.
3. Rahmad Hidayat , S.AP., M.AP. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram
4. Amin Saleh, S.Sos.,M.I.Kom. Sebagai Dosen pembimbing utama.
5. M. Taufik Rachman,S.H.,M.H. sebagai Dosen Pembimbing Pendamping.
6. Mardiah, S.SOS.,M.Si. sebagai Dosen Penguji.
7. Tidak bisa di pungkiri untuk kedua orang tuaku, bapak Nursalam Ibrahim dan Ibu Herwati Susanti tercinta sebagai tanda bukti, hormat, dan kasih sayang penulis berterimakasih yang tiada terhingga yang tidak mungkin dapat ku balas atas jasa-jasamu.
8. Untuk adek-adeku tersayang M. Rofi jainul mutaqqin dan M. Roihan Putra yang selalu mengantar kemanapun dan membantu mencari data pada saat penelitian. Terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan penelitiannya.

9. Untuk sahabat-sahabtku Hiji, Iqbal, Sulaiman dan Muliawan terimakasih yang selalu memberikan support, motivasi, dukungan yang tak terhingga selama ini, Terimakasih karena kalian selalu ada untuk penulis disaat suka maupun duka.
10. Untuk Seperjuanganku Squad AP yuyun, Ummul, Riani, Rahma, Meisah, Mona dan Anis terimakasih atas waktu dan kenangan baiknya teman-teman tanpa kalian aku bukanlah apa-apa, terimakasih telah berjuang bersama.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga segala saran dan kritikan yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini sangatlah kami harapkan. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi kita semua khususnya Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Prodi Administrasi Publik.

Mataram, Februari 2022

Maratun Awalia Sa'bani Putri
218110109

ABSTRAK
**STRATEGI KANTOR KELURAHAN KANDAI DUA DALAM
MENINGKATKAN PELAYANAN PROGRAM FORUM ANAK MELALUI
GARDU TANGKAS PERAK (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Kandai
dua Kecamatan woja Kabupaten Dompu) .**

Maratun Awalia Sabani Putri¹, Amin Saleh², M. Taufik Rachman³
Mahasiswa¹, Pembimbing utama² Pembimbing Pendamping³
Program Studi Administrasi Publik Fakultas ilmu sosial dan Ilmu Politik

strategi kantor kelurahan kandai dua dalam meningkatkan pelayanan program forum melalui gardu tangkas perak Masalah yang akan di teliti dalam penelitian ini ada dua indikator yaitu pertama, Bagaimana Strategi Kantor kelurahan kandai dua dalam memberikan pelayanan program forum anak melalui gardu tangkas perak, yang kedua Apa faktor Penghambat forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di kelurahan kandai dua kabupaten Dompu. Dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama Untuk mengetahui Strategi kelurahan kandai dua dalam memberikan pelayanan program forum anak melalui gardu tangkas perak, dan yang kedua adalah Untuk mengetahui faktor penghambat program forum anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di kelurahan kandai dua dompu.

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah metode penelitian kualitatif Deskriptif, dengan menggunakan narasumber dengan cara mengumpulkan data melalui obesrvasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan tehnik analisis data dengan cara mengedit data, melakukan reduksi data, mengkategorikan satuan-satuan yang menyangkut sumber informan, penapsiran data, menguji keabsahan data dan mengambil kesimpulan. Hasil penelitian tentang Strategi Kantor kelurahan kandai dua dalam meningkatkan pelayanan program forum anak melalui gardu tangkas perak menunjukkan bahwa Pemerintah Kelurahan menggunakan Pelayanan dari teori *new public service* Menurut Denhardt dan Denhart yaitu pelayanan publik berlandaskan persamaan hak diantara warga negara dan Tidak membedakan pelayanan.

Kata Kunci : Strategi, Pelayanan, Forum anak

ABSTRACT

THE KANDAI DUA VILLAGE OFFICE STRATEGY IN IMPROVING CHILDREN'S FORUM PROGRAM SERVICES THROUGH *GARDU TANGKAS PERAK* (Case Study at the Kandai Dua Village Office, Woja, Dompu)

Amin Saleh¹, M. Taufik Rachman², Maratun Awalia Sabani Putri³
Main Advisor¹ Second Advisor², Student³

Public Administration Study Program, Faculty of Social and Political Sciences

This research is intended to figure out how the Kandai 2 sub-district office plans to improve forum program services using the *Gardu Tangkas Perak*. This study will look at two indicators: 1) what is the Kandai Dua sub-district office's strategy for providing children's forum program services through the *Gardu Tangkas Perak*, and 2) what are the inhibiting factors for the children's forum in overcoming violence against children in the Kandai Dua sub-district, Dompu district. The goals of this study are to discover: a) Kandai Dua Village's strategy for offering children's forum program services through *Gardu Tangkas Perak*, and b) the inhibiting factors of the children's forum program in combating violence against children in Kandai Dua Dompu village.

The method used in this research is descriptive qualitative research method, using sources by collecting data through observations, interviews and documentation. Researchers used data analysis techniques by editing data, data reduction, categorizing units related to sources of informants, interpreting data, testing data validity and drawing conclusions. According to the findings of a study on the Kandai Dua sub-district office's strategy for improving the service of the children's forum program through the *Gardu Tangkas Perak*, the sub-district government employed services based on the new public service theory. Public services, according to Denhardt and Denhart, are founded on citizens' equal rights and do not discriminate between services.

Keywords: *Strategy, Service, Children's Forum*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
PLAGIARISME	v
PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK INDONESIA	x
ABSTRAK INGGRIS	xi
DAFTAR ISI	xii
DAFTARTABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Penelitian	4
1.3.2 Manfaat Penelitian	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu	6
2.2 Landasan teori	12
2.2.1 Strategi	12
2.2.2 Pelayanan Publik	16
2.2.3 Forum Anak	23
2.3 Model Berpikir	29
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Jenis Penelitian	31

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian	31
3.3 Sumber Data.....	32
3.4 Teknik Penentuan Informan/Narasumber	32
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.6 Instrumen Pengumpulan Data.....	34
3.7 Teknik Analisis Data.....	34
3.8 Keabsahan Data.....	36
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
4.1 Profil Desa Dan Kelurahan	39
4.1.1 Potensi Sumber Daya Alam	39
4.1.2 Aspek Kependudukan Kelurahan kandai dua	45
4.1.3 Pemerintah Kelurahan.....	49
4.1.4 Hasil Penelitian	50
4.2 Pembahasan.....	50
4.2.1 Strategi kelurahan kandai dua dalam memberikan pelayanan forum anak melalui gardu tangkas perak	50
4.2.2 Tujuan Dibentuknya Gardu Tangkas Perak	63
4.2.3 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan pada anak.....	70
4.3 Faktor Penghambat Forum anak dalam mengatasi Kekerasan pada anak di kelurahan kandai dua.....	75
BAB V PENUTUP	
5.1 Kesimpulan	79
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu	6
Tabel 2.2.2 Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik.....	18
Tabel 4.1.1 Batas Wilayah	39
Tabel 4.1.1 Penetapan Batas dan Wilayah	39
Tabel 4.1.1 Luas Wilayah Menurut Penggunaan	39
Tabel 4.1.1 Iklim.....	39
Tabel 4.1.1 Jenis dan Kesuburan Tanah.....	42
Tabel 4.1.1 Topografi.....	42
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Kelurahan Kandai Dua	45
Tabel 4.1.2 Jumlah Kepala Keluarga Kelurahan Kandai Dua	45
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok umur dan Jenis kelamin.....	45
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian Kelurahan Kandai Dua	46
Tabel 4.1.2 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kelurahan Kandai Dua	46
Tabel 4.1.2 Tabel Jumlah Penduduk Kelurahan kandai Dua	47
Tabel 4.1.2 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Dinamika Penduduk	47
Tabel 4.1.2 Tabel Jumlah Sarana Pendidikan diKelurahan Kandai Dua	47
Tabel 4.1.2 Tabel Jumlah Sarana Peribadatan diKelurahan Kandai Dua	48
Tabel 4.1.2 Tabel Jumlah Sarana Ruang Terbuka Hijau dan Olahraga	48
Tabel 4.1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan.....	49
Tabel 4.1.3 Pertanggung Jawaban Lurah	49
Tabel 4.2.1. Permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak.....	51

DAFTAR GAMBAR

Bagan 2.2.2 Segitiga Pelayanan Publik.....	20
Bagan 2.3 Model Berpikir.....	29
Bagan 4.2.1 Struktur organisasi satuan tugas (satgas)	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan pelayanan, melaksanakan pembangunan dan mengatur serta mengurus masyarakat, dengan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang melindungi dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Penyelenggaraan pelayanan publik memiliki aspek layered, oleh karena itu dalam membahas dan melaksanakan strategi pelaksanaan tidak dapat hanya didasarkan pada satu aspek saja, misalnya aspek ekonomi atau aspek politik saja. Pendekatan tersebut harus terintegrasi dengan aspek legitimate/legal.

Paradigma kebijakan pelayanan publik di period otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berada dalam rangka mewujudkan great administration. Pelayanan publik meliputi penyelenggaraan barang publik dan regulasi publik. Barang Publik, terkait dengan penyediaan infrastruktur, barang dan jasa, termasuk pelayanan dasar atau inti, yang menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah pusat/pemerintah daerah. Sedangkan regulasi publik terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan dan kebijakan dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban. Menurut undang-undang no. 25 Tahun 2009 Pasal 1 Yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan pelayanan

administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. (Hardiansyah, 2015).

DI Desa Kandai Dua, Pemerintah Membentuk Satgas Gerakan Terpadu sebagai bentuk pengabdian kepada perempuan dan anak yang bertujuan untuk menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Seperti yang telah disampaikan oleh Kepala Dinas PPPA Kabupaten Dompu Hj. Daryati Kustilawati, SE., M.Si mengatakan satgas ini ditunjuk langsung oleh kepala desa Kandai Dua sebagai Satgas Gardu Induk Perak di tingkat Desa Kandai Dua. “Yang berjumlah sekitar 17 Satgas. Pemerintah Kabupaten Dompu melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang Satgas Tangkas Perak Gardu yang bertujuan untuk (1) mencegah segala bentuk kekerasan terhadap anak perempuan dan anak; (2) melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan; (3) menindak pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (4) memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan (5) memulihkan kondisi fisik, psikis, dan ekonomi perempuan dan anak korban kekerasan ([https://www.kla.id/pengukuhan-satgas-gardu-tangkas-perak-tekan-kerasan-terhadap-perempuan-dan-anak -in-kelurahan-kandai-duawoja-dompu/](https://www.kla.id/pengukuhan-satgas-gardu-tangkas-perak-tekan-kerasan-terhadap-perempuan-dan-anak-in-kelurahan-kandai-duawoja-dompu/) diakses pada 22 November 2021).

Seperti yang terjadi di Kabupaten Dompu dimana perempuan dan anak menjadi korban kekerasan. Contohnya seperti kasus (KDRT), Broken Home, Sexual Harassment, Fraud, Infidelity, Debt, Abandonment,

Trafficking/Trafficking in Persons (TPPO). Keduanya akan diluncurkan di Rumah Perak (Perempuan dan Anak) sebagai Puspaga Center (Pusat Belajar Keluarga). Berdasarkan uraian tentang kekerasan terhadap anak dan perempuan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait Strategi Kantor Kecamatan Kandai Dua dalam Pemberian Pelayanan Program Forum Anak melalui Gardu Induk Tangkas Perak.

Secara formal kebijakan ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
4. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 42).
5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Gugus Tugas Penanganan Masalah Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kabupaten Layak Anak (KLA).
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1998 tentang Upaya Kesejahteraan Anak Bagi Anak Yang Bermasalah.
10. Keputusan Bupati Dompu Nomor 341 Tahun 2019 tentang Standar Operasional Prosedur Satgas Gerakan Terpadu Penanggulangan Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi Kelurahan Kandai dua dalam Memberikan Pelayanan Forum Anak Melalui Gardu tangkas perak?
2. Apa Faktor Penghambat forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kelurahan kandai dua Kab. dompu?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mengumpulkan data, untuk dijadikan sebagai karya tulis yang baik. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui strategi Kelurahan Kandai dua dalam Memberikan Pelayanan Forum Anak Melalui Gardu Tangkas Perak.
2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak di Kelurahan kandai dua Kab. dompu.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis, yaitu memperluas khazanah keilmuan dalam usaha meningkatkan ilmu pengetahuan khususnya dalam Program Forum anak dan

penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan wacana dan kajian selanjutnya dalam upaya pemerintah menangani kekerasan terhadap anak.

2. Secara Praktis.

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan yang dianggap lebih konkrit khususnya perihal Memberikan pelayanan Program Forum Anak Melalui Gardu Tangkas Perak.
2. Bagi Kantor, dapat menjadi bahan masukan, khususnya dalam hal Strategi Kelurahan kandai dua dalam meningkatkan pelayanan program forum anak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Tujuan penelitian terdahulu adalah untuk mengetahui bangunan keilmuan yang sudah di letakan oleh orang lain, sehingga penelitian yang akan di lakukan benar-benar baru dan belum di teliti oleh orang lain. hal ini dapat diselesaikan dengan mencari penelitian yang cakupnya lebih luas. (Sugiyono,2010)

Tabel, 2.1 Pemetaan Hasil Penelitian Terdahulu

No	Penulis & Tahun	Judul	Masalah	Hasil
1.	Ulil Asmy, 2020	Peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak DP3AP2KB (dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak,	Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber maka dapat diketahui bahwa hambatan yang dialami Forum Anak dalam mengerjakan kegiatan aksi kekerasan pada anak adalah	Peran program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak ada 3 yaitu, Kampanye Toperak (Tolak Pernikahan Usia Anak), Sosialisasi Katakana Tidak Pada Usia Dini, Jangka (Jaringan Komunikasi

		pengendalian penduduk, dan keluarga berencana) kabupaten Sinjai	kurangnya partisipasi SDM. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon aksi kekerasan terhadap anak Kendala yang dihadapi saat ini adalah masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian kekerasan pada anak.	Anak). Adapun faktor pendukung dan Peran Program Forum Anak dalam mengatasi kekerasan pada anak yaitu, Pembina Forum Anak, Pendamping Forum Anak, Fasilitator Forum Anak, Pengurus Forum Anak.
2.	Melani Sahputri dan Hasim As'ari, 2021	Implementasi Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak di kabupaten Rokan Hulu	Penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak masih belum terimplementasi dengan baik, sebagaimana yang diharapkan. Hal ini dapat dibuktikan dari	Salah satunya Program Kabupaten layak anak dan masih rendahnya pemahaman serta komitmen dalam kabupaten layak anak dan puskesmas ramah anak yang belum ada, sehingga program kebijakan tersebut belum

			<p>temuan penelitian per kriteria kebijakan yang belum disampaikan oleh Merille S.Grindle Diantaranya 1) sosialisasi yang belum merata dilakukan oleh Dinsos P3A Bidang PPA sehingga mengakibatkan sedikit informasi terkait peraturan daerah ini yang di terima oleh masyarakat dan kurang maksimalnya peran dari aktor kebijakan dan masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan.</p>	<p>sesuai kriteria. Terbatasnya sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan disebabkan anggaran dana yang terbatas.</p>
3.	La Ode Muhamma d Elwan,	Rekomendasi kebijakan program kota	Karakteristik agen pelaksana dalam hal ini	Dari penelitian ini ketidaktepatan

	2018	layak anak Di kota kendari	Pemerintahan Kota Kendari, lemahnya koordinasi antar satuan tugas dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari yang cenderung kurang sinkron antar agen, pelaksanaannya. Dinas dan Badan yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Kota Kendari sebagian besar belum paham betul akan tupoksinya, serta sinkronisasi yang belum maksimal karena masih kurangnya tindak lanjut dari hasil koordinasi yang sudah dilakukan	koordinasi antar satuan tugas dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari yang cenderung kurang sinkron antar agen
3.	Maratun awalia	Strategi Kantor Kelurahan	Permasalahan yang terjadi	Satgas Gardu

sa'bani putri,2021	Kandai Dua Dalam Meningkatkan Pelayanan Program Forum Anak Melalui Gardu Tangkas Perak (Studi Kasus Pada Kantor Kelurahan Kandai Dua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu)	terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Dompu. Seperti Kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), Broken Home, Pelecehan Seksual, Penipuan, Perselingkuhan, Terlilit Hutang, Penelantaran, Traficcking/Tinda k Pidana Perdagangan Orang (TPPO).	Tangkas Perak ini sebagai upaya pencegahan agar kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak terjadi lagi di Kab. Dompu “Gardu Tangkas Perak” (Gerakan Terpadu Tangani Kekerasan Terhadap Perempuan dan anak) adalah suatu gerakan yang dilaksanakan oleh masyarakat, dari masyarakat dan unttk masyarakat guna mewujudkan perlindungan
-----------------------	---	--	--

				<p>terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan layanan fisik, informasi, Rujukan, Konsultasi dan Advokasi bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.</p>
--	--	--	--	---

Dapat di simpulkan dari empat penelitian di atas bahwa dari empat kabupaten tersebut belum maksimal pelyanan program forum anak di karenakan yang terjadi pada kab. sinjai yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam merespon aksi kekerasan pada anak, dan lokasi yang belum di sentuh semua. pihak *DP3AP2KB* telah menyediakan program forum anak sebagai organisasi atau lembaga sosial yang di gunakan sebagai wadah atau pranata sosial bagi anak yang berusia 18 tahun dimana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok dan anak yang dikelola oleh anak-anak dan di bina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengarkan aspirasi, suara pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.

Sedangkan pada kab. Rokan Hulu Implementasi kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak masih belum terimplementasikan dengan baik di karenakan dalam pelaksanaannya sumber daya yang di gunakan ada sumber daya manusia dan anggaran. Dan Juga kemudian sarana dan prasana dalam mendukung pelaksana kebijakan yang meliputi rumah aman, ruang khusus untuk anak dalam pelaksanaan kebijakannya belum ada. Sedangkan pada kota Kendari masih melemahnya koordinasi antar satuan tugas dalam pelaksanaan Kebijakan Pengembangan KLA di Kota Kendari yang cenderung kurang sinkron antar agen, pelaksanaannya, itulah yang menjadi hambatan dalam menjalani program layak anak pada kota tersebut. Dan dari Penelitian yang dilakukan pada Kab. dompu Terdapat perbedaan dalam bentuk pelaksanaan program forum anak, di kab. dompu di bentuk Gardu Tangkas Perak untuk melindungi tingkat kekerasan pada perempuan dan anak.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Strategi

Strategi berasal dari bahasa Yunani yang berarti kepemimpinan dalam tentara, yaitu bagaimana mengatur perang, bagaimana mengkondisikan dan memerintahkan suatu tentara. Pemahaman strategi dalam perkembangannya ditunjukkan dengan adanya perbedaan konsep dari para ahli, hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai definisi strategi. Definisi tersebut adalah:

Menurut Prof.Dr. Mardiasmo, MBA, AK Strategi adalah "Teknik atau metode yang digunakan oleh organisasi untuk mencapai visi yang telah

dirumuskan. Strategi berisi seperangkat pedoman yang menjelaskan bagaimana organisasi akan mencapai misinya dan mengarahkannya ke arah visi. Ibarat orang yang memiliki cita-cita tinggi untuk menjadi dokter yang profesional dan berjiwa luhur, ia akan melakukan berbagai cara untuk mencapainya, misalnya dengan belajar dengan sungguh-sungguh, bersikap disiplin, taat beribadah dan lain sebagainya. Cara mencapai tujuan itulah yang dimaksud dengan strategi. Dengan menggambarkan suatu strategi, dapat membantu organisasi menyelaraskan dan memfokuskan arah pencapaian visi dengan pedoman dan instruksi yang jelas dan dipahami bersama. (<http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>, diakses 08 November 2021)

Pengertian strategi yang berbeda menurut Daoed Joesoef dalam konteks manajemen dalam perang adalah "Seluruh operasi intelektual dan fisik yang diperlukan untuk merespon, mempersiapkan, dan mengendalikan setiap aktivitas kolektif di tengah konflik, mengingat konflik yang diperkirakan terjadi melibatkan berbagai kekuatan, sehingga strateginya cepat. terkait politik, yang intinya berurusan dengan diplomatik, budaya, ekonomi, komersial, militer, untuk memilih atau menggabungkan. (<http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>, diakses 08 November 2021).

Strategi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan salah satu cara dalam reformasi birokrasi, yang berangkat dari kondisi kualitas pelayanan publik itu sendiri yang ditentukan oleh kualitas sikap dan karakter aparatur sipil negara. Menurut Gaspersz, peningkatan kualitas adalah kegiatan teknis dan manajemen,

yang melaluinya kita mengukur karakteristik kualitas produk (barang dan/atau jasa).

(Dalam Hardiansyah, 2015) Strategi pertama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah pengembangan lembaga penyelenggara pelayanan. Hal ini dilakukan dengan membangun budaya organisasi untuk mewujudkan Good Governance. Menurut Djokosantoso Moeljono, pembentukan budaya organisasi yang diterapkan mempengaruhi kinerja individu yang berdampak pada kinerja organisasi antara lain:

1. Moral yang tinggi: jujur, saling menghormati, mentaati peraturan yang berlaku.
2. Profesionalisme: bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan.
3. Contoh: Sebagai contoh yang baik.
4. Penghormatan terhadap sumber daya manusia: merekrut dan mempertahankan sumber daya manusia sesuai dengan kualitasnya.

Strategi kedua untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik adalah dengan mengubah sikap dan karakter sumber daya manusia sebagai pemberi pelayanan, yaitu melaksanakan pelayanan publik yang memuaskan masyarakat tanpa membeda-bedakan (equity) dan kejujuran atau keterbukaan (decency) dalam pelayanan. Pelayanan yang memuaskan dipengaruhi oleh kompetensi aparatur sipil negara.

Strategi ketiga untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memuaskan adalah perlunya suatu compositions atau mekanisme pelaksanaannya yang tepat guna menghasilkan kualitas yang memuaskan bagi masyarakat. Compositions pelaksanaan kewajiban pemerintah dapat dilakukan dengan strategi pelaksanaan pelayanan, sebagai berikut:

1. Sederhanakan Pegawai

Peran pemerintah dalam melaksanakan pelayanan umum dapat memuaskan masyarakat sebagai pelanggannya. Kriteria pelayanan yang memuaskan atau yang disebut dengan pelayanan prima mencakup empat prinsip, yaitu:

- a. pelayanan harus cepat.
- b. Pelayanan harus tepat.
- c. Pelayanan harus akurat.
- d. Pelayanan harus berkualitas.

2. Mendahulukan kepentingan masyarakat (Putting Customer First)

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, birokrasi pemerintah harus selalu berorientasi pada kepentingan pelanggan yaitu masyarakat. Untuk itu birokrasi pemerintah harus banyak mendengarkan kebutuhan, keinginan masyarakat dan apa yang tidak disukai masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat harus dibangun, karena itu birokrasi pemerintah juga harus menjadi inspiration atau engine penggerak tumbuhnya partisipasi tersebut. Sehingga dapat

memberikan kemudahan, kesempatan dan kemampuan kepada masyarakat secara objektif untuk melayani kebutuhannya sendiri. (<http://journal.uir.ac.id/index.php/JIAP>, diakses 08 November 2021)

3. Pemanfaatan dan Pemberdayaan Bawahan

Para pelaku birokrasi pemerintah dalam menjalankan tugas dan fungsinya harus mampu memberikan pelayanan yang cepat dan tidak lambat. Untuk itu setiap pimpinan harus memanfaatkan potensi setiap bawahan seoptimal mungkin, pembagian tugas bawahan harus dibagi secara jelas dan merata dengan meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia melalui berbagai upaya yang telah dilakukan untuk memberdayakan bawahan agar menjadi profesional. tenaga kerja.

4. Kembali ke Fungsi Dasar Pemerintah

Fungsi dasar pemerintahan yang terpenting adalah memberikan pelayanan dan mengayomi masyarakat dalam rangka mencapai kesejahteraan masyarakat, termasuk kesejahteraan dalam segala bidang kehidupan masyarakat.

2.2.2 Pelayanan Publik

Pelayanan publik memiliki berbagai pengertian yang dapat menimbulkan berbagai pendapat tentangnya. Pelayanan Publik dapat dipahami sebagai suatu organisasi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memenuhi kewajiban kepada masyarakat umum sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan pemerintah itu sendiri. Pengertian pelayanan menurut Sampara adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung

antara seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan memberikan kepuasan pelanggan. Dan definisi layanan yang diberikan oleh Ivancevich, Lorenzi, Skinner, dan Crosby adalah produk yang tidak terlihat (tidak dapat disentuh) yang melibatkan upaya manusia dan menggunakan peralatan. tradisional (administrasi publik lama) ke model manajemen publik baru (new Public administration), dan terakhir ke model layanan publik baru (new open help). Menurut Denhardt dan Denhart seperti yang tergambar pada tabel di bawah ini. (Dalam Wijoyo Suparto, 2006).

Dalam model pelayanan publik yang baru, pelayanan publik didasarkan pada persamaan hak di antara warga negara. Dalam model ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil exchange dari berbagai nilai yang ada dalam masyarakat. Kepentingan publik tidak dirumuskan oleh elit politik sebagaimana diatur dalam peraturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara keseluruhan. peran pemerintah adalah merundingkan dan mengabaikan berbagai kepentingan warga dan berbagai kelompok masyarakat yang ada. Dalam model ini, birokrasi publik tidak hanya harus akuntabel terhadap berbagai aturan hukum, tetapi juga harus akuntabel terhadap nilai-nilai yang ada dalam masyarakat, norma negara. itulah sederet konsep pelayanan publik yang ideal saat ini di time demokrasi. (Dalam Wijoyo Suparto, 2006).

Tabel 2.2.2 Pergeseran Paradigma Model Pelayanan Publik (dalam Wijoyo suparto,2006).

Aspek	Old publik adm.	New publik adm.	New publik service
Dasar teoritis	Teori politik	Teori ekonomi	Teori demokrasi
Konsep kepentingan publik	Kepentingan publik adalah sesuatu yang didefinisikan secara politis dan yang tercantum dalam aturan	Kepentingan publik mewakili agregasi dari kepentingan individu	Kepentingan publik adalah hasil dari dialog tentang berbagai nilai
Kepada siapa birokrasi publik harus bertanggung jawab	Clients dan pemilih	Customers	Warganegara (citizens)
Peranan pemerintah	Rowing (pengayuh)	Steering (mengarahkan)	Negosiasi dan mengelaborasi berbagai kepentingan diantara warga negara dan kelompok komunitas
Akuntabilitas	Menurut hirarki administratif	Kehendak pasar yang merupakan hasil keinginan customers	Multi aspek akuntabel pada hukum, nilai komunitas, norma politik, standar profesional, kepentingan warga negara

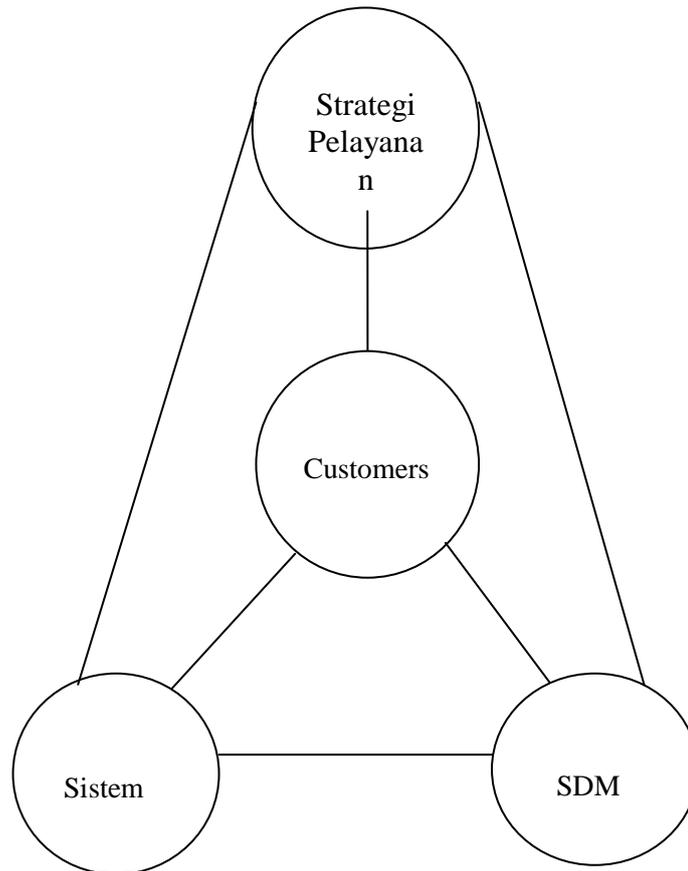
Landasan teori pelayanan publik yang ideal menurut paradigma pelayanan publik baru sebagaimana dibahas di atas adalah pelayanan publik harus memberikan pelayanan yang cepat terhadap berbagai kepentingan masyarakat dan nilai-nilai yang ada. Tugas pemerintah adalah melaksanakan tugas dan fungsinya untuk kepentingan berbagai warga negara dan kelompok masyarakat. Hal ini

menunjukkan bahwa karakter dan nilai yang terkandung dalam pelayanan publik tersebut harus mengandung nilai-nilai yang ada di masyarakat. karena masyarakat bersifat netral, maka pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah harus mengikuti perkembangan masyarakat saat ini.

Kualitas pelayanan publik merupakan hasil timbal balik dari berbagai ruang lingkup, yaitu sistem pelayanan, sumber daya manusia penyedia layanan, strategi, dan masyarakat. Sistem pelayanan publik yang baik akan menghasilkan kualitas pelayanan publik yang baik pula. Dengan demikian segala bentuk penyimpangan yang terjadi akan mudah diketahui. sistem pelayanan yang diberikan oleh pemerintah harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Artinya suatu organisasi harus mampu menyediakan kebutuhan dan keinginan masyarakat dengan memberikan struktur dan strategi pelayanan yang tepat.

Jelaslah bahwa penyelenggaraan pelayanan publik secara menyeluruh merupakan tanggung jawab pemerintah yang berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk atau masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhannya. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah merupakan kegiatan yang harus dilakukan sesuai dengan keinginan dan tuntutan masyarakat itu sendiri. Selain itu, implementasi regulasi juga memerlukan pengawasan dan pengawasan dari seluruh lapisan masyarakat, agar pelayanan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Bagan 2.2.2 Segitiga Pelayanan Publik (Dalam Wijoyo suparto, 2006).



Layanan ideal menurut para ahli. Produk organisasi publik pada umumnya adalah pelayanan publik. Untuk itu, jika kita meminjam pendapat Levine (1990: 188), produk pelayanan publik di negara demokrasi setidaknya harus memenuhi tiga indikator, yaitu: daya tanggap, tanggung jawab, dan akuntabilitas. (Dalam Wijoyo Suparto, 2006).

1. Daya tanggap atau responsiveness adalah daya tanggap penyelenggara terhadap harapan, keinginan dan aspirasi serta tuntutan pelanggan.
2. Tanggung jawab atau tanggung jawab adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana expositions pemberian pelayanan publik dilakukan sesuai dengan prinsip atau ketentuan administrasi dan organisasi yang benar dan telah ditetapkan.

3. Akuntabilitas atau akuntabilitas adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar expositions pemberian pelayanan telah sesuai dengan kepentingan partners dan norma yang berkembang di masyarakat.

Dalam melihat kinerja organisasi publik, yaitu pelayanan publik yang terdiri dari: produksi, kualitas, fleksibilitas, dan kepuasan untuk tindakan jangka pendek, persaingan dan pengembangan untuk jangka menengah, dan kelangsungan hidup (Wijoyo Suparto, 2006).

1. Produksi adalah ukuran yang menunjukkan kemampuan organisasi untuk menghasilkan keluaran yang dibutuhkan oleh lingkungannya.
2. Kualitas adalah kemampuan organisasi untuk memenuhi harapan pelanggan dan klien.
3. Efisiensi adalah rasio terbaik antara yield dan input.
4. Fleksibilitas adalah ukuran yang menunjukkan daya tanggap organisasi terhadap tuntutan perubahan inward dan eksternal dan eksternal. Fleksibilitas berkaitan dengan kemampuan organisasi untuk mengalihkan sumber daya dan aktivitas dari satu aktivitas ke aktivitas lain untuk menghasilkan produk dan layanan baru dan berbeda, menanggapi permintaan pelanggan.
5. Kepuasan adalah menunjukkan perasaan karyawan terhadap pekerjaan dan perannya dalam organisasi.
6. Persaingan menggambarkan posisi organisasi yang berkompeten dengan organisasi lain yang sejenis.
7. Pengembangan adalah ukuran yang mencerminkan kemampuan dan tanggung jawab organisasi dalam meningkatkan kapasitas dan potensinya untuk berkembang melalui investasi sumber daya.

8. Kelangsungan hidup adalah kemampuan organisasi untuk bertahan terhadap setiap perubahan.

Menurut KepMenPan 81/1995 kinerja organisasi publik dalam memberikan pelayanan publik dapat dilihat dari indikator-indikator seperti; kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisiensi, ekonomi, keadilan dan ketepatan waktu. (Dalam Wijoyo Suparto 2006).

1. Effortlessness, yaitu prosedur atau goodbye cara pelayanan umum harus mudah, dirancang sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pelayanan publik mudah, lancar, cepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan.
2. Kejelasan dan kepastian mengenai prosedur, rincian biaya pelayanan dan cara pembagiannya, jadwal waktu penyelesaian pelayanan, dan satuan kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan publik.
3. Keamanan, yaitu upaya memberikan rasa aman dan kebebasan kepada nasabah dari segala bahaya, risiko, dan keragu-raguan. Compositions dan hasil pelayanan publik dapat memberikan kepastian hukum.
4. Keterbukaan, yaitu pelanggan dapat mengetahui semua informasi yang mereka butuhkan dengan mudah dan jelas, yang meliputi informasi prosedur, persyaratan, waktu penyelesaian, biaya dan lain-lain.
5. Efisien, yaitu persyaratan pelayanan publik hanya terbatas pada hal-hal yang berkaitan langsung dengan pencapaian tujuan pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara kebutuhan dan produk pelayanan publik yang diberikan. Selain itu, juga harus mencegah terulangnya pemenuhan kelengkapan persyaratan, dalam hal compositions pelayanan mensyaratkan kelengkapan persyaratan satuan kerja atau instansi pemerintah terkait lainnya.

6. Ekonomis, yaitu pengenaan biaya jasa ditetapkan secara adil dengan memperhatikan nilai barang/jasa dan kemampuan membayar pelanggan.
7. Keadilan yang terasa yaitu ruang lingkup atau jangkauan pelayanan publik harus diusahakan semaksimal mungkin dengan pemerataan dan diperlakukan secara adil.
8. Ketepatan waktu, yaitu agar penyelenggaraan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam jangka waktu yang ditentukan.

Dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah berupa barang dan jasa yang dilakukan oleh suatu pemerintah. pelayanan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat.

2.2.3 Forum Anak

Forum Anak adalah wadah untuk menampung anak-anak di bawah usia 18 tahun yang mengalami kekerasan yang anggotanya adalah anak-anak yang dibina oleh pemerintah sebagai media untuk mendengarkan dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak di lingkungan masyarakat. compositions pengembangan. Anak-anak yang dibina dalam gathering anak melalui gardu Tangkas perak ini adalah anak-anak yang pernah mengalami kekerasan, injury psikis akibat kekerasan yang dialaminya. Tugas dan fungsi Forum Anak adalah:

a. Tugas

1. Sebagai wadah partisipasi anak di Indonesia serta organisasi penegakan hak anak di Indonesia.
2. Menjadi sarana bagi anak untuk berpartisipasi dalam pembangunan;

3. Menjadi jembatan antara anak dan pemerintah

b. Fungsi

1. Pemantauan pemenuhan hak dan kewajiban anak;
2. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya;
3. Menyuarakan pandangan, suara dan aspirasi anak;
4. Terlibat dalam compositions pengambilan keputusan;
5. Terlibat langsung dalam musrembang;
6. Mendorong anak untuk aktif mengembangkan potensi dan bakatnya.

Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Kandai Dua dalam meningkatkan program gathering anak adalah dengan mengeluarkan SK untuk membentuk satuan tugas gerakan terpadu (satgas) penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tugasnya sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di Kecamatan Kandai Dua Kabupaten Woja.
2. Melakukan observasi langsung ke setiap lingkungan untuk melihat kondisi dan pelayanan yang dibutuhkan oleh perempuan dan anak yang mengalami kekerasan di Kecamatan Kandai Dua Kabupaten Woja.
3. Melindungi perempuan dan anak di tempat kejadian dari hal-hal yang dapat membahayakan diri sendiri.
4. Menempatkan dan mengevakuasi perempuan dan anak yang mengalami masalah.

5. Memberikan rekomendasi kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu untuk mendapatkan pelayanan lebih lanjut.
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Dompu melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu.

(http://www.kla.id/wp-content/transfers/2019/09/SK-Satgas-gardu_tangkas-perak-kelurahan-Kandai-DuaWoja-Dompu.pdf, diunduh pada 17 September 2021).

Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Gardu Tangkas Perak) Desa Kandai Dua Kecamatan Woja sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Menerima pengaduan permasalahan yang muncul berkaitan dengan perempuan dan anak di Kecamatan Kandai Dua Kabupaten Woja.
2. Mengawasi dan mengawasi pelaksanaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di Kecamatan Kandai Dua Kabupaten Woja.
3. Berkoordinasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Dompu dan dinas/instansi terkait dalam upaya penanganan perempuan dan anak di Kecamatan Kandai Dua Kabupaten Woja.
4. Menyampaikan laporan pelaksanaan perlindungan dan penanganan perempuan dan anak di Kecamatan Kandai Dua Kecamatan Woja kepada Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap

Perempuan dan Anak (Gardu Tangkas) Perak) di Tingkat Kecamatan Woja dan Kabupaten Dompu.(http://www.kla.id/wp-content/transfers/2019/09/SK-Satgas-gardu_tangkas-perak-kelurahan-Kandai-DuaWoja-Dompu.pdf, diunduh pada 17 September 2021).

Tindakan kekerasan atau pelanggaran terhadap hak anak tersebut dapat terwujud setidaknya dalam empat bentuk, yaitu:

1. Kekerasan fisik, bentuk ini paling muda Gerakan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Gardu Tangkas Perak) Kecamatan Kandai Dua Kecamatan Woja dalam menjalankan tugasnya dapat mengangkat Pelaksana Teknis dan membentuk Sekretariat. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam diktum KEDUA keputusan ini, Satuan Tugas (Satgas) Gerakan Terpadu Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (Gardu Tangkas Perak) Kecamatan Kandai Dua Kecamatan Woja bertanggung jawab untuk Kepala Desa Kandai Dua dan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatannya. Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Dompu melalui DPA-OPD Desa Kandai Dua Kecamatan Woja. (http://www.kla.id/wp-content/transfers/2019/09/SK-Satgas-gardu_tangkas-perak-kelurahan-Kandai-DuaWoja-Dompu.pdf, diunduh pada 17 September 2021).

Tidak dikenali. Terkategorisasi sebagai kekerasan jenis ini adalah; menampar, menendang, memukul/meninju, mencekik, mendorong, mengigit, membenturkan, mengancam dengan benda tajam dan sebagainya.

Korban kekerasan jenis ini biasanya tampak secara langsung pada fisik korban, seperti; luka memar, berdarah, patah tulang, pingsang, bentuk lain yang kondisinya lebih berat.

2. Kekerasan psikis, kekerasan jenis ini tidak begitu mudah untuk dikenali. Akibat yang disaranka oleh korban tidak maemberikan bekas yang tampak jelas bagi oaring lain. Dampak kekerasan jenis ini akan berpengaruh pada siruasi oerasaan tidak aman dan nyaman, menurunnya harga diri serta martabat korban. Wujud konkret kekerasan atau pelanggaran jeni ini adalah; penggunaan kata-kata kasar, penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan oaring lain atau didepan umum.
3. Jenis kekerasan seksual, termasuk dalam kategori dalam ini adalah segala tindakan yang muncul dalam bentuk paksaan atau mengancam untuk melakuakn hubungan seksual(*sexual intercourse*), melakukan penyiksaan atau bertindak sadis serta meninggalkan seseorang termasuk mereka yang tergolong masih berusia anak-anak setelah melakukan hububgan seksualitas.
4. Jenis kekerasan ekonomi, kekerasan jenis ini sangat sering terjadi di lingkungan keluarga. Perilaku melarang pasangan untuk bekerja atau mencampuri pekerjaan pasangan, menolak memberikan uang atau mengambil uang, serta mengurangi jatah belanja bulanan, kekerasan jenis ini sering terjadi ketika orang tua memaksa anak yang masih berusia

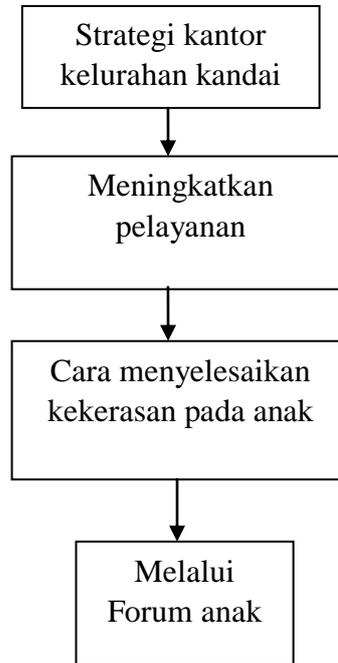
dibawah umur untuk dapat memberikan kontribusi ekonomi keluarga, sehingga fenomena penjual Koran, pengamen jalanan, pengemis anak

Mekanisme Kerja Satgas Gardu Tangkas Perak sebagai berikut :

1. Perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, melaporkan kasus yang dialaminya kepada satgas.
2. Anggota satgas menindak lanjuti laporan yang di laporkan oleh perempuan dan anak korban kekerasan tersebut.
3. melakukan analisis permasalahan Perempuan dan anak yang di laporkan.
4. melakukan Penjangkauan dengan mengeluarkan surat penugasan kepada anggota satgas.
5. Setelah melakukan penjangkauan satgas memastikan alamat rumah korban dan membawa surat penugasan, dan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berwajib.
6. Satgas melakukan kegiatan terhadap korban dengan melakukan wawancara dan observasi.
7. satgas melakukan pertimbangan dalam hidup dan tumbuh kembang anak.
8. Satgas memastikan korban dengan melakukan wawancara untuk memperoleh informasi dan compositions kejadian.
9. observasi dilakukan guna mengetahui kondisi korban yang mengalami kekerasan.
10. setelah menjalani aktivitas terhadap korban satgas Gardu Tangkas Perak melaporkan dan merekomendasikan kepada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kab. Dompu.

2.3 Model Berfikir

Bagan 2.3. Model Berpikir



Berdasarkan penelitian dan beberapa survey atau kajian terkait "Strategi Kantor Desa Kandai Dua Dalam Peningkatan Pelayanan Program Forum Anak Melalui Tangkas Perak Gardu" seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, peneliti mengembangkan kerangka penelitian yaitu kerangka peneliti untuk memperjelas hubungan antara konsep, teori atau pendekatan yang digunakan. akan digunakan dalam penelitian ini dan mencoba menjawab inti permasalahan yang diangkat oleh peneliti dalam proposition ini.

Standar dan sasaran dalam melaksanakan strategi desa kandai dua dalam meningkatkan pelayanan program discussion anak melalui gardu gesit perak di kecamatan kandai dua, kec. woja, kab. Dompu akan dianalisis dengan melihat dua hal, yaitu; Pertama, bagaimana strategi Desa Kandai Dua dalam Memberikan

Pelayanan Forum Anak melalui gardu gesit perak? Sedangkan untuk menganalisis yang kedua, apa saja faktor penghambat Forum Anak dalam penanggulangan kekerasan terhadap anak di Desa Kandai Dua, Kab. dompu?

Sedangkan untuk menganalisis peningkatan pelayanan publik, menggunakan indikator pelayanan publik baru menurut Denhardt dan Denhart seperti yang tergambar pada tabel. Dalam model pelayanan publik yang baru, pelayanan publik didasarkan pada persamaan hak di antara warga negara. Dalam model ini, kepentingan publik dirumuskan sebagai hasil exchange dari berbagai nilai yang ada dalam masyarakat. Kepentingan publik tidak dirumuskan oleh elit politik sebagaimana diatur dalam peraturan. Birokrasi yang memberikan pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara keseluruhan. (Dalam Wijoyo Suparto, 2006).

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dalam penelitian kualitatif prosedur penelitiannya tidak baku dan bersifat fleksibel. Jadi, ada petunjuk-petunjuk yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, meskipun dapat dikatakan bahwa metode yang withering mendasar adalah observasi atau wawancara mendalam. Observasi (pengamatan) yang dimaksud adalah deskripsi sistematis tentang peristiwa dan perilaku dalam setting sosial yang dipilih untuk penelitian" (Marshall and Rossman, 1998:79). (Dalam Suyanto Bagong dan Sutinah, 2008).

Alasan menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang jelas tentang Strategi Kantor Desa dalam Peningkatan Pelayanan Program Forum Anak melalui Tangkas Perak Gardu. Menurut Sugiyono (2016:8) menyatakan bahwa metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. (Dalam Handoyo Eko).

3. 2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian Penulis memilih lokasi penelitian dilakukan di Kantor Kelurahan kandai dua, Kecamatan. woja, Kabupaten. Dompu. Adapun Waktu

penelitian dilakukan selama 6 bulan dimulai pada tanggal 1 september tahun 2021 sampai dengan tanggal 30 februari tahun 2022.

3.3 Sumber Data

Menurut Sutopo (2006:56), sumber information adalah tempat dimana information diperoleh dengan menggunakan metode tertentu, baik berupa manusia, artefak, maupun dokumen. Sedangkan menurut Arikunto: 144), sumber information adalah subjek dari mana suatu information dapat diperoleh.

3.4 Tehnik Penentuan Informan/ Narasumber

Teknik yang digunakan peneliti adalah purposive examining, yaitu pengambilan informan dengan pertimbangan dan kriteria tertentu. Purposive examining menurut Sugiyono (2016:148) adalah teknik penentuan sampel penelitian dengan pertimbangan tertentu yang bertujuan agar information yang diperoleh lebih representatif. Maka penulis merumuskan indikatornya, yaitu:

1. Pak Lurah Kandai Dua
2. Sekretaris Lurah
3. Staf Kelurahan
4. Satgas Gardu Tangkas Perak
5. Anak-anak

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Untuk menghimpun data yang diperlukan, maka dipergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

(Slamet 2011) menyatakan bahwa wawancara adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Teknik pengumpulan information peneliti dilakukan dengan teknik wawancara yang merupakan salah satu pengumpulan information dalam sebuah penelitian. karena melibatkan information, maka wawancara merupakan unsur penting dalam compositions penelitian. Wawancara (interviews) dapat diartikan sebagai suatu metode yang digunakan untuk memperoleh informasi (information) dari responden dengan cara bertanya langsung secara tatap muka. Dan peneliti juga melakukan wawancara terstruktur dengan membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada para informan.

b. Observasi

Menurut Pauline Young, Observasi adalah suatu studi yang dilakukan dengan sengaja/terrencana dan sistematis melalui penglihatan/pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi pada saat itu. Observasi dilakukan dengan cara mengamati atau menelaah secara seksama dan pengamatan langsung oleh penulis di lapangan atau lokasi penelitian untuk mengetahui keadaan yang terjadi atau membuktikan kebenaran penelitian yang dilakukan. Metode ini digunakan untuk mengamati fenomena dan gejala sosial yang ada di lokasi penelitian, untuk mendukung keabsahan information dari apa yang telah dan akan diamati.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono (2015:329) dokumentasi adalah suatu metode yang digunakan untuk memperoleh information dan informasi berupa buku, arsip, dokumen, angka tertulis dan gambar berupa laporan dan informasi yang dapat menunjang penelitian. Metode dokumentasi adalah metode yang mencari information mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berbentuk catatan, transkrip, atau buku dan brosur. Dengan teknik pengumpulan information dalam penelitian ini berupa aturan kelembagaan, foto dokumen kelembagaan, buku dan penelitian terdahulu, buletin atau laporan berita. disiarkan ke media massa yang relevan dengan masalah yang diteliti.

3.6 Instrumen Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, tetapi jika fokus penelitian telah diperoleh, peneliti dapat menggunakan instrumen penelitian sesuai dengan teknik pengumpulan information yang digunakan. Sugiyono (2010:61) menegaskan bahwa "dalam penelitian kualitatif pada awalnya, dimana masalahnya tidak jelas dan pasti, instrumennya adalah peneliti itu sendiri. Tetapi setelah masalah yang akan diteliti jelas, barulah suatu instrumen dapat dikembangkan".

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis information digunakan untuk memadukan hasil penelitian sehingga menjadi satu kesatuan yang dapat dipahami. Dalam analisis information kualitatif bersifat induktif, yaitu berdasarkan information yang diperoleh yang dikembangkan menjadi hipotesis. Miles and Huberman (Sugiyono, 2010: 91),

mengemukakan bahwa kegiatan dalam analisis information kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Dalam analisis information kualitatif menurut model Miles dan Huberman ada tiga langkah, yaitu:

1. Reduksi Data

Merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memusatkan perhatian pada hal-hal yang penting, mencari tema, dan pola untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti dalam mengumpulkan information lebih lanjut, dan mencarinya jika diperlukan dari information yang didapat di lapangan.

Dalam penelitian ini, reduksi information dimulai dari mentransfer hasil wawancara ke dalam bentuk tertulis agar lebih mudah dianalisis. Peneliti mengadakan kegiatan yang menitikberatkan pada penyederhanaan, pemilihan, dan transformasi information mentah yang muncul dari observasi, transkrip wawancara, dan penelaahan dokumen, merangkum dan memilih hal-hal pokok untuk difokuskan pada kesesuaian tujuan penelitian. teknik triangulasi merupakan bagian dari derajat kepercayaan.

2. Penyajian Data

Prinsip dasar penyajian information adalah berbagi pemahaman kita tentang sesuatu dengan orang lain. karena ada information yang diperoleh dalam penelitian kualitatif berupa customized organization individualized structure dan bukan berupa angka-angka, maka penyajiannya biasanya berupa uraian

customized structure individualized organization dan tidak berbentuk tabel dengan ukuran statistik. Seringkali information disajikan dalam bentuk kutipan langsung dari hasil wawancara itu sendiri.

3. Menarik kesimpulan

Dalam penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan dapat dilakukan mulai dari compositions pengumpulan information hingga reduksi dan penyajian information. Namun kesimpulan tersebut belum last, sehingga penarikan kesimpulan dapat mendorong peneliti untuk memperdalam compositions observasi dan wawancara. Jadi, dalam menarik kesimpulan dari penelitian kualitatif, peneliti harus bergerak di antara empat hal, yaitu pengumpulan information, reduksi information, penyajian information, dan penarikan kesimpulan. Kesimpulan ditarik dengan cara membandingkan semua information yang disajikan dengan teori yang ada, kemudian peneliti memberikan penilaian.

3.8 Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan information dalam penelitian kualitatif memerlukan sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong (2009:324) "ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (believability), keteralihan (adaptability), ketergantungan (reliability), dan kepastian (confirmability). Masing-masing kriteria tersebut menggunakan kriteria tersendiri."

Uji kredibilitas (believability) atau menguji kepercayaan terhadap information penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya ilmiah. Sedangkan

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan tingkat keakuratan atau keberlakuan hasil penelitian terhadap populasi tempat sampel diambil. Dependability atau penelitian yang reliabel, dengan individualized structure lain beberapa percobaan yang dilakukan akan selalu mendapatkan hasil yang sama.

Teknik ini dinilai sangat mungkin dilakukan oleh peneliti mengingat keterbatasan peneliti. Teknik triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan konstruksi realitas yang ada dalam konteks suatu penelitian ketika mengumpulkan information tentang peristiwa dan hubungan dari berbagai perspektif. Dengan individualized structure lain, triangulasi itu, peneliti dapat mengecek kembali temuannya dengan membandingkan dengan berbagai jenis triangulasi.

Dalam triangulasi metode terdapat dua strategi, yaitu: pengecekan derajat keyakinan temuan hasil penelitian dari beberapa teknik pengumpulan information dan pengecekan derajat keyakinan seberapa besar sumber information menggunakan metode yang sama. Dalam penelitian ini peneliti melakukan metode wawancara yang didukung dengan metode observasi dan penelusuran dokumen pada saat wawancara dilakukan. Expositions triangulasi teknik/metode dilakukan dengan mengkolaborasikan pengumpulan information melalui wawancara, observasi dan dokumenter.

Berdasarkan berbagai model triangulasi tersebut, untuk memudahkan peneliti dalam melakukan triangulasi, peneliti dapat melakukan hal tersebut dengan cara:

1. Ajukan berbagai pertanyaan.
2. Cek dengan berbagai sumber information.
3. Memanfaatkan berbagai metode agar pengecekan keabsahan information dapat dilakukan, yaitu dengan wawancara, observasi, dan pemeriksaan dokumen.